

CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14);
- n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);

- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
- t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
- u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 36);
- w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
- x. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
- y. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 73).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1. Pendapatan-LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Pendapatan-LO
 - 3.1.4. Beban
 - 3.1.5. Aset
 - 3.1.6. Kewajiban
 - 3.1.7. Ekuitas
- Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
- Bab V. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
Pendapatan	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56
Pendapatan Asli Daerah	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56
Hasil Retribusi Daerah	2.335.200.000,00	2.488.750.000,00	153.550.000,00	106,57
Retribusi Jasa Umum	2.335.200.000,00	2.488.750.000,00	153.550.000,00	106,57
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56
BELANJA DAERAH	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	(3.272.567.500,00)	98,38
BELANJA TIDAK LANGSUNG	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77
Belanja Pegawai	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77
Gaji Dan Tunjangan	5.677.156.673,00	5.416.950.049,00	(260.206.624,00)	95,41
Tambahan Penghasilan PNS	175.277.200.000,00	175.129.339.972,00	(147.860.028,00)	99,91
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.831.000,00	69.831.000,00	-	100,00
BELANJA LANGSUNG	21.659.970.010,00	18.795.469.162,00	(2.864.500.848,00)	86,77
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.005.415.150,00	1.864.767.443,00	(140.647.707,00)	92,98
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.223.105.150,00	1.117.497.562,00	(105.607.588,00)	91,36
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	382.310.000,00	357.211.060,00	(25.098.940,00)	93,43
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	400.000.000,00	390.058.821,00	(9.941.179,00)	97,51
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.874.495.000,00	1.840.184.230,00	(34.310.770,00)	98,16
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	296.030.000,00	294.328.500,00	(1.701.500,00)	99,42
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.188.623.000,00	1.159.565.750,00	(29.057.250,00)	97,55
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	231.967.000,00	228.431.080,00	(3.535.920,00)	98,47
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	157.875.000,00	157.858.900,00	(16.100,00)	99,98
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	207.000.000,00	206.894.550,00	(105.450,00)	99,94
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	26.300.000,00	26.300.000,00	-	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	24.354.750,00	24.345.850,00	(8.900,00)	99,96
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	144.345.250,00	144.303.700,00	(41.550,00)	99,97
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12.000.000,00	11.945.000,00	(55.000,00)	99,54
PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	4.218.825.800,00	2.518.137.420,00	(1.700.688.380,00)	59,68
Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	2.806.993.000,00	1.314.464.150,00	(1.492.528.850,00)	46,82
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.411.832.800,00	1.203.673.270,00	(208.159.530,00)	85,25
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	6.073.843.000,00	5.721.678.435,00	(352.164.565,00)	94,20
Pengembangan Profesionalisme Aparatur	4.587.558.000,00	4.468.346.865,00	(119.211.135,00)	97,40
Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	1.486.285.000,00	1.253.331.570,00	(232.953.430,00)	84,32
PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	2.732.682.000,00	2.535.000.704,00	(197.681.296,00)	92,76
Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	2.508.123.000,00	2.322.389.169,00	(185.733.831,00)	92,59
Penegakan Disiplin Aparatur	224.559.000,00	212.611.535,00	(11.947.465,00)	94,67

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.433.302.560,00	1.259.080.000,00	(174.222.560,00)	87,84
Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	811.222.000,00	716.776.260,00	(94.445.740,00)	88,35
Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	622.080.560,00	542.303.740,00	(79.776.820,00)	87,17
PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	3.114.406.500,00	2.849.726.380,00	(264.680.120,00)	91,50
Pengukuran Kompetensi Pegawai	2.528.012.000,00	2.325.577.700,00	(202.434.300,00)	91,99
Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	586.394.500,00	524.148.680,00	(62.245.820,00)	89,38
JUMLAH BELANJA	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	(3.272.567.500,00)	98,38
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(200.343.907.683,00)	(196.917.790.183,00)	3.426.117.500,00	98,28

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah kegiatan:

1. Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur

Pada kegiatan ini realisasi anggaran tidak bisa tercapai 100 % realisasi tercapai 46,82%. Secara umum, kurang optimalnya capaian target anggaran/kinerja disebabkan oleh adanya ketergantungan Pemda DIY terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan seleksi CPNS.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tanggal 01 Oktober 2019 perihal Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi 2019, jadwal pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi 2019 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	Oktober sd November 2019
2.	Pendaftaran	November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Desember 2019
4.	Masa sanggah	Desember 2019
5.	Pengumuman hasil sanggah	Desember 2019
6.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020
7.	Pengumuman peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
8.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
9.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020
10.	Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS	April 2020

Dengan demikian, rangkaian kegiatan seleksi CPNS Formasi 2019 yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019 belum dapat terealisasi.

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Realisasi kegiatan ini tercapai sebesar 85,25%. Beberapa kendala dalam pencapaian kegiatan ini adalah:

- Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 bahwa mulai bulan April 2019 Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta non PNS.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah menyesuaikan kegiatan pengambilan foto ID Card.
- Sisa belanja pada Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/Mesin Absensi Simplek merupakan hasil negosiasi harga.

3. Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur

Kegiatan ini realisasi anggaran tidak bisa tercapai 100 %, realisasi tercapai 84,32%. Beberapa masalah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang semula dianggarkan bagi 24 orang untuk 4 kegiatan, namun berdasarkan evaluasi terhadap Standar Belanja Tahun 2019 hanya dialokasikan untuk 4 orang.
- Berdasarkan Nota Dinas tanggal 8 November 2019 telah disampaikan telaah kepada Pimpinan terkait dengan rencana pelaksanaan Seleksi JPT Pratama. Penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah) DIY mengalami keterlambatan (dilantik 6 November 2019), sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan tahapan seleksi JPT Pratama. Berdasarkan saran lisan dari Inspektur DIY dalam Rapat Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat) tanggal 19 November 2019, agar pelaksanaan kegiatan seleksi ditunda. Implikasinya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut agar tidak dipakai seluruhnya dan/atau dikembalikan ke kas daerah. Honorarium hanya diberikan kepada Sekretariat dan Panitia Seleksi untuk 1 bulan.

4. Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun

Kegiatan ini realisasi tercapai sebesar 88,35%. Kendala dalam pencapaian target ini adalah Honorarium Harian Non PNS sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak dapat terealisasi karena terkait dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 bahwa mulai bulan April 2019 Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta non PNS.

5. Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian

Kegiatan Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian mencapai realisasi sebesar 87,17%. Hal ini disebabkan oleh adanya Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kearsipan mengundurkan diri karena diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Pegawai Front Office mengundurkan diri karena mengikuti suami sehingga Honorarium Non PNS dan Iuran BPJS tidak terserap dengan maksimal.

6. Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi

Kegiatan ini mencapai realisasi sebesar Rp89,38%. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pencapaian kegiatan ini adalah masih terkait dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 bahwa mulai bulan April 2019 Honorarium Non PNS hanya diperuntukkan bagi peserta non PNS. Kendala yang lain adalah adanya pembatalan pendampingan Calon Assessor Angkatan II karena kegiatan Pengukuran dengan Metode Assessment Center dari Kabupaten Kulon Progo tidak jadi dilaksanakan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

	2019	2018 (Audited)
<u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp2.493.800.000,00</u>	<u>Rp 1.367.050.000,00</u>

Pendapatan-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar **Rp2.340.250.000,00** dan realisasi sebesar **Rp2.493.800.000,00** atau **106,56 %** dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.1.1 <u>Pendapatan Asli Daerah - LRA</u>	<u>Rp2.493.800.000,00</u>	<u>Rp1.367.050.000,00</u>

Pendapatan Asli Daerah-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar **Rp2.340.250.000,00** dan realisasi sebesar **Rp2.493.800.000,00** atau **106,56 %** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Pendapatan Asli Daerah				
a	Pendapatan Retribusi Daerah	2.335.200.000,00	2.488.750.000,00	106,58 %
b	Lain-lain PAD Yang Sah	5.050.000,00	5.050.000,00	100 %
	Jumlah	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	106,56%

	2019	2018 (Audited)
3.1.1.2 <u>Pendapatan Transfer - LRA</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pendapatan Transfer pada tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan.

	2019	2018 (Audited)
3.1.1.3 <u>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LRA</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan.

3.1.2. Belanja

Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp202.684.157.683,00 dengan realisasi sebesar Rp199.411.590.183,00 atau 98,38%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp198.305.227.683,00</u>	<u>Rp 198.268.045.911,00</u>

Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp201.407.947.683,00 dan realisasi sebesar Rp198.305.227.683,00 atau 98,46%, dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Rp184.237.696.021,00	Rp 186.495.921.964,00

Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp185.689.071.513,00 dan realisasi sebesar Rp184.237.696.021,00 atau 99,22%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	5.677.156.673,00	5.416.950.049,00	95,42
	Gaji Pokok PNS	4.542.852.204,00	4.319.597.080,00	95,09
	Tunjangan Keluarga	409.865.734,00	396.521.294,00	96,74
	Tunjangan Jabatan	258.600.000,00	252.300.000,00	97,56
	Tunjangan Fungsional	74.194.000,00	69.440.000,00	93,59
	Tunjangan Fungsional Umum	163.518.125,00	159.000.000,00	97,24
	Tunjangan Beras	216.538.155,00	209.583.480,00	96,79
	Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus	11.512.831,00	10.443.905,00	90,72
	Pembulatan Gaji	75.624,00	64.290,00	85,01
2	Tambahan Penghasilan PNS	175.277.200.000,00	175.129.339.972,00	99,92
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	174.586.000.000,00	174.484.569.972,00	99,94
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup	691.200.000,00	644.770.000,00	93,28
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.831.000,00	69.831.000,00	100
	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	69.831.000,00	69.831.000,00	100
4	Honorarium PNS	4.121.970.000,00	3.476.915.000,00	84,35
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.696.615.000,00	1.650.745.000,00	97,30
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	36.700.000,00	16.310.000,00	44,44
	Honorarium Pengelola Keuangan	53.040.000,00	48.840.000,00	92,08
	Honorarium Pengelola Kepegawaian	5.400.000,00	2.700.000,00	50,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	2.324.815.000,00	1.752.920.000,00	75,40
	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
5	Honorarium Non PNS	542.913.840,00	144.660.000,00	26,65
	Honorarium Harian Non PNS	404.910.000,00	79.410.000,00	19,61
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	138.003.840,00	65.250.000,00	47,28
	Jumlah	185.689.071.513,00	184.237.696.021,00	99,22

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.14.067.531.662,00	Rp.11.772.123.947,00

Belanja Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp15.718.876.170,00 dan realisasi sebesar Rp14.067.531.662,00 atau 89,49%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	301.153.845,00	296.920.150,00	98,58
2	Belanja Bahan/Material	145.254.200,00	134.373.400,00	92,51
3	Belanja Jasa Kantor	1.391.408.900,00	1.269.103.137,00	91,21
4	Belanja Iuran BPJS	5.016.000,00	1.800.000,00	35,89
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	165.125.000,00	164.484.400,00	99,61
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.872.500,00	309.691.600,00	96,82
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.023.000,00	47.618.700,00	47,61
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.160.000,00	7.350.000,00	60,44
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.261.010.000,00	336.343.900,00	26,67
10	Belanja Makanan dan Minuman	1.539.646.000,00	1.307.741.170,00	84,94
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
12	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	100
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	116.480.000,00	115.356.500,00	99,04
14	Belanja Perjalanan Dinas	3.184.193.250,00	3.112.653.375,00	97,75
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.122.894.475,00	1.558.370.000,00	99,94
16	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.502.206.185,00	2.106.785.000,00	99,24
17	Belanja Pemeliharaan	1.697.345.000,00	1.667.261.830,00	98,23
18	Belanja Jasa Konsultansi	418.600.000,00	414.628.500,00	99,05
19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.275.325.000,00	1.113.050.000,00	87,28
20	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
Jumlah		15.718.876.170,00	14.067.531.662,00	89,49

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.2 Belanja Modal	Rp 1.106.362.500,00	Rp 505.563.000,00

Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.276.210,00 dan realisasi sebesar Rp1.106.362.500,00 atau 86,69%, dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Rp0,00	Rp0,00

Belanja Modal Tanah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan.

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.063.050.500,00	Rp505.563.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.232.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.063.050.500,00 atau 86,24%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	938.000.000,00	770.042.000,00	82,09
2	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.080.600,00	49.940.000,00	99,72
3	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.792.400,00	92.823.500,00	98,97
4	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	102.000.000,00	101.750.000,00	99,75
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	38.000.000,00	37.750.000,00	99,34
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	10.837.000,00	10.745.000,00	99,15
	Jumlah	1.232.710.000,00	1.063.050.500,00	86,24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp19.980.000,00, Alat Rumah Tangga sebesar Rp137.460.000,00, Komputer sebesar Rp92.823.500,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp48.495.000, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp27.500.000,00 dan terdapat penambahan aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp32.000.000,00. Selain itu terdapat reklas dari Paket Pekerjaan Pengadaan ID Card ke Persediaan Perlengkapan Dinas sebesar Rp571.560.000 dan Beban Dokumentasi sebesar Rp133.232.000,00.

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.2.3		
<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan.

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.2.4		
<u>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</u>	<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp.0,00</u>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan.

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.2.5		
<u>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan.

	2019	2018 (Audited)
3.1.2.2.6		
<u>Belanja Modal Aset Lainnya</u>	<u>Rp43.312.000,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Belanja Modal Aset Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp43.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.312.000,00 atau 99,57% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	43.500.000,00	43.312.000,00	99,57
	Jumlah	43.500.000,00	43.312.000,00	99,57

3.1.3. Pendapatan-LO

	2019	2018 (Audited)
<u>Pendapatan-LO</u>	<u>Rp2.493.800.000,00</u>	<u>Rp1.367.050.000,00</u>

Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp2.493.800.000,00 yang merupakan Pendapatan Retribusi-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

	2019	2018 (Audited)
3.1.3.1 <u>Pendapatan Retribusi-LO</u>	Rp2.488.750.000,00	Rp1.364.800.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp2.488.750.000,00 terdiri dari Pendapatan Retribusi-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah.

	2019	2018 (Audited)
3.1.3.2 <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO</u>	Rp5.050.000,00	Rp2.250.000,00

Pada tahun 2019 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp5.050.000,00 yang berasal dari sewa ruangan untuk kantin dan sewa ruang usaha koperasi dan fotokopi.

3.1.4. **Beban**

	2019	2018 (Audited)
<u>Beban</u>	Rp199.933.705.473,72	Rp 199.751.396.247,61

Realisasi Beban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp199.933.705.473,72 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.4.1 <u>Beban Operasi</u>	Rp199.933.705.473,72	Rp 199.751.396.247,61

Realisasi Beban Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp199.933.705.473,72 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 184.231.004.529,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp14.096.281.500,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 1.606.419.444,72 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.4.1.1 <u>Beban Pegawai</u>	Rp184.231.004.529,00	Rp186.503.293.328,00

Realisasi Beban Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp184.231.004.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	5.410.258.557,00
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	4.314.801.080,00
	Tunjangan Keluarga - LO	396.065.550,00
	Tunjangan Jabatan - LO	252.300.000,00
	Tunjangan Fungsional - LO	68.660.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum - LO	158.630.000,00
	Tunjangan Beras - LO	209.293.800,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	10.443.905,00
	Pembulatan Gaji - LO	64.222,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	175.129.339.972,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	174.484.569.972,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup - LO	644.770.000,00
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.831.000,00
	Insentif Retribusi Jasa Umum - LO	69.831.000,00
4	Honorarium PNS	3.476.915.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.745.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.310.000,00
	Honorarium Pengelola Keuangan	48.840.000,00
	Honorarium Pengelola Kepegawaian	2.700.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	1.752.920.000,00
	Honorarium Perencana Program	5.400.000,00
6	Honorarium Non PNS	144.660.000,00
	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap	65.250.000,00
	Honorarium Harian Non PNS	79.410.000,00
	Jumlah	Rp184.231.004.529,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai sejumlah Rp184.237.696.021,00 dengan Beban Pegawai sejumlah Rp184.231.004.529,00. Perbedaan nilai yang terjadi antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai adalah sebesar Rp6.691.492,00. Hal ini dikarenakan terdapat pelunasan utang gaji pegawai bulan Desember 2018 sebesar Rp7.371.364,00 sehingga beban berkurang sejumlah tersebut. Selain itu, terdapat utang gaji pegawai bulan Desember 2019 sebesar Rp679.872,00 sehingga menambah beban pegawai.

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp7.371.364,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	Rp5.392.400,00
Tunjangan Keluarga – LO	Rp 539.240,00
Tunjangan Fungsional – LO	Rp 780.000,00
Tunjangan Fungsional Umum – LO	Rp 370.000,00
Tunjangan Beras – LO	Rp 289.680,00
Pembulatan Gaji – LO	Rp 44,00

Beban Pegawai	Rp 679.872,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 679.872,00

Oleh karena itu terdapat selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp6.691.492,00.

	2019	2018 (Audited)
3.1.4.1.2 <u>Beban Barang dan Jasa</u>	<u>Rp14.096.281.500,00</u>	<u>Rp11.435.025.662,00</u>

Realisasi Beban Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.096.281.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	424.157.800,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	135.693.400,00
3	Beban Jasa Kantor	1.400.311.249,00
4	Beban Premi Asuransi	1.800.000,00
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	43.584.400,00
6	Beban Cetak dan Penggandaan	311.269.900,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.618.700,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	7.350.000,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	336.343.900,00
10	Beban Makanan dan Minuman	1.307.741.170,00
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	664.579.330,00
12	Belanja Pakaian Kerja	-
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-
14	Beban Perjalanan Dinas	3.112.653.375,00
15	Beban Pemeliharaan	1.008.344.776,00
16	Beban Jasa Konsultasi	414.628.500,00
17	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.558.370.000,00
18	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.106.785.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.113.050.000,00
20	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	102.000.000,00
	Jumlah	Rp14.096.281.500,00

Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah senilai Rp 14.067.531.662,00 sedangkan jumlah beban barang dan jasa adalah senilai Rp14.096.281.500,00. Selisih tersebut adalah sejumlah Rp(28.749.838,00). Hal ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Beban Bertambah dikarenakan:

Selisih saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan	Rp 9.109.220,00
Pembayaran hutang listrik, telepon dan air bulan Desember 2018	Rp 31.712.043,00
Reklas hard disk dari persediaan menjadi aset tetap	Rp 5.992.000,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan (Panel Interior Balai)	Rp 141.814.250,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan – Ruang Balai	Rp 197.465.000,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan – Genteng Talang	Rp 145.100.000,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan – Selasar	Rp 92.869.514,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan – Conblok	<u>Rp 81.668.290,00</u>
	Rp 705.730.317,00

Beban Berkurang dikarenakan:

Pengakuan hutang listrik dan telepon bulan Desember 2019	Rp 29.688.155,00
Reklas ID Card ke persediaan	Rp 571.560.000,00
Reklas Beban Jasa ID Card	<u>Rp 133.232.000,00</u>
	Rp 734.480.155,00

Jumlah Rp (28.749.838,00)

	2019	2018 (Audited)
3.1.4.1.3 <u>Beban Penyusutan dan Amortisasi</u>	<u>Rp 1.606.419.444,72</u>	<u>Rp 1.813.077.257,61</u>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.606.419.444,72 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.336.369.386,16
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	243.799.638,61
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	26.250.419,95
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
	Jumlah	Rp1.606.419.444,72

	2019	2018 (Audited)
3.1.4.1.4 <u>Beban Penyisihan Piutang</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Realisasi Beban Penyisihan Piutang

	2019	2018 (Audited)
3.1.4.1.5 <u>Beban Lain-lain</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Realisasi Beban Realisasi Beban Lain-lain.

3.1.5. Aset

Aset Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2019 sebesar **Rp13.160.355.685,22** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp81.306.670,00**, Aset Tetap sebesar **Rp 11.798.723.815,22** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 1.280.325.200,00** dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp81.306.670,00</u>	<u>Rp72.197.450,00</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp81.306.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.1.1	<u>Rp0</u>	<u>Rp0</u>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp0 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,-

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.1.2	<u>Rp0</u>	<u>Rp0</u>

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.1.3	<u>Rp0</u>	<u>Rp0</u>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,-

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.1.4	<u>Rp0</u>	<u>Rp0</u>

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,-

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.1.5	<u>Rp81.306.670,00</u>	<u>Rp 72.197.450,00</u>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp81.306.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1.	Barang Konsumsi	10.165.750,00
a.	Persediaan Alat Tulis Kantor	5.158.300,00
b.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	380.750,00
c.	Persediaan Barang Cetakan	4.626.700,00
2.	Persediaan Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan	53.657.170,00
a.	Persediaan Perlengkapan Dinas	53.657.170,00
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	1.733.750,00
a.	Persediaan Peralatan Kantor/Rumah Tangga/alat kebersihan	1.733.750,00
4.	Persediaan Bahan Baku	15.750.000,00
a.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.750.000,00
	Jumlah	81.306.670,00

Terdapat perbedaan persediaan barang konsumsi berupa persediaan alat tulis kantor sebesar Rp5.992.000,00. Hal ini disebabkan reklas eksternal hard disk sebesar Rp5.992.000,00 dari beban persediaan alat tulis kantor menjadi aset tetap.

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2 Aset Tetap	<u>Rp12.298.723.515,22</u>	<u>Rp12.446.375.705,94</u>

Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.298.723.515,22 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2.1 Tanah	<u>Rp400.000.000,00</u>	<u>Rp400.000.000,00</u>

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar **Rp400.000.000,00** berasal dari saldo awal sebesar **Rp400.000.000,00** pada tahun 2019 tidak ada pengadaan tanah.

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2.2 Peralatan dan Mesin	<u>Rp13.249.555.830,00</u>	<u>Rp13.407.085.337,00</u>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp13. 249.555.830,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp336.750.500,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2019 sebesar Rp336.750.500,00.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Presensi Elektronik	Rp 37.570.000,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp 101.750.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp 19.980.000,00
Alat Pendingin	Rp 29.960.000,00
Komputer	Rp 80.281.100,00
Peralatan Personal Komputer	Rp 12.542.400,00
Peralatan Studio	Rp 17.950.000,00
Alat Komunikasi	Rp 30.545.000,00

Selain itu, terdapat beberapa kapitalisasi sebagai berikut:

Eksternal hard disk dari beban persediaan alat tulis kantor	Rp 5.992.000,00
Jumlah	Rp 336.750.500,00

Selama Tahun 2019 tidak terdapat Peralatan dan Mesin pelimpahan dari Organisasi Perangkat Daerah lain.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp462.280.007,00 yaitu penghapusan sebesar Rp462.280.007,00.

c. Penerimaan hibah

Pada tahun 2019 tidak ada Penerimaan Hibah

d. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp32.000.000,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp13. 249.555.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1	Peralatan dan Mesin	
	Alat-Alat Besar Darat	0
	Alat-Alat Besar Apung	0
	Alat-alat Bantu	433.699.000,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.448.503.650,00
	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.900.000,00
	Alat Angkut Apung Bermotor	0
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0
	Alat Angkut Bermotor Udara	0
	Alat Bengkel Bermesin	6.050.000,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin	0
	Alat Ukur	0
	Alat Pengolahan	3.240.000,00
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0
	Alat Kantor	3.459.387.671,00
	Alat Rumah Tangga	4.139.288.810,00
	Komputer	2.030.692.050,00
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.277.000,00
	Alat Studio	1.571.775.649,00
	Alat Komunikasi	93.742.000,00
	Alat Kedokteran	2.000.000,00
	Jumlah	Rp13. 249.555.830,00

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2.3	<u>Gedung dan Bangunan</u>	<u>12.656.225.063,00</u>
		<u>12.078.976.299,00</u>

Pada tahun anggaran 2019 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp577.248.764,00 yang menambah nilai Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan (Panel Interior Balai)	Rp 141.814.250,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan – Selasar	Rp 92.869.514,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan – Ruang Balai	Rp 197.465.000,00
Reklas beban pemeliharaan gedung dan bangunan – Genteng Talang	Rp 145.100.000,00
Jumlah	Rp577.248.764,00

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2.4	<u>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</u>	<u>Rp 772.038.404,00</u>
		<u>Rp 690.370.114,00</u>

Kapitalisasi pemeliharaan gedung dan bangunan/conblok sebesar Rp81.668.290,00.

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2.5	<u>Rp126.786.300,00</u>	<u>Rp126.786.300,00</u>

Pada tahun anggaran 2019 tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp126.786.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
	Aset Tetap Lainnya	126.786.300,00
	Buku	100.546.300,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	26.240.000,00
	Alat Olah Raga Lainnya	0
	Jumlah	126.786.300,00

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2.6	<u>Rp500.008.700,00</u>	<u>Rp0</u>

Pada tahun 2019 terdapat mutasi tambah sebesar Rp500.008.700,00 pada Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tak Berwujud, yakni berupa DED.

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.2.7	<u>Rp(15.405.881.781,78)</u>	<u>Rp(14.256.842.344,06)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp(15.405.881.781,78) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Akumulasi Penyusutan	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.219.177.627,10)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.013.078.276,28)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(151.875.878,40)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.750.000,00)
	Jumlah	Rp(15.405.881.781,78)

	2019	2018(Audited)
3.1.5.3	<u>Rp780.316.500,00</u>	<u>Rp1.204.613.200,00</u>

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp780.316.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.3.1	<u>Tagihan Jangka Panjang</u>	<u>Rp0</u>

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.3.2	<u>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</u>	<u>Rp0</u>

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0.

	2019	2018 (Audited)
3.1.5.3.3	<u>Aset Tidak Berwujud</u>	<u>Rp775.416.500,00</u>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar **Rp775.416.500,00** dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah
Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2019 sebesar Rp70.812.000,00 terdiri dari:
 - Software ID Card Rp27.500.000,00.
 - Software si-Tamu Rp43.312.000,00.
- b. Mutasi kurang
Mutasi kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp500.008.700,00 berupa DED bergeser ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- c. Penerimaan hibah
Tidak ada penerimaan hibah Aset Tidak Berwujud.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo ATB per 31 Desember 2019 sebesar **Rp775.416.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	775.416.500,00
	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0
	Jumlah	775.416.500,00

Saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp775.416.500,00 tersebut meliputi software sebesar Rp746.166.500,00 dan website sebesar Rp29.250.000,00.

3.1.6. Kewajiban

	2019	2018 (Audited)
3.1.6	<u>Kewajiban</u>	<u>Rp30.368.027,00</u>

Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.368.027,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.6.1	<u>Kewajiban Jangka Pendek</u>	<u>Rp30.368.027,00</u>
		<u>Rp39.083.407,00</u>

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.368.027,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.6.1.1	<u>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</u>	<u>Rp0</u>
		<u>Rp0</u>

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 Rp0

	2019	2018 (Audited)
3.1.6.1.2	<u>Pendapatan Diterima Dimuka</u>	<u>Rp0</u>
		<u>Rp0</u>

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 Rp0.

	2019	2018 (Audited)
3.1.6.1.3	<u>Utang Belanja</u>	<u>Rp30.368.027,00</u>
		<u>Rp39.083.407,00</u>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2019 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	679.872,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	29.688.155,00
	Jumlah	30.368.027,00

	2019	2018 (Audited)
3.1.6.1.4	<u>Utang Jangka Pendek Lainnya</u>	<u>Rp0</u>
		<u>Rp0</u>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 Rp0.

3.1.7. Ekuitas

	2019	2018 (Audited)
3.1.7	<u>Ekuitas</u>	<u>Rp13.129.987.658,22</u>
		<u>Rp 13.684.102.948,94</u>

Saldo Ekuitas sebesar Rp13.129.987.658,22 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2019. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	EKUITAS AWAL	13.684.102.948,94
	Surplus/Defisit - LO	(197.439.905.473,72)
	RK PPKD	196.917.790.183,00
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(32.000.000,00)
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	13.129.987.658,22

Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar berasal dari:

Mutasi Tambah Aset Ekstrakomtabel		
- Ekstrakomtabel		(32.000.000,00)
	Jumlah	<u>(32.000.000,00)</u>

Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar Rp32.000.000,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

Tugas Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumus kebijakan teknis bidang kepegawaian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian
3. Pembina dan pelaksana tugas di bidang kepegawaian.
4. Pemberi fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/ Kota.
5. Perlindungan dan pengembangan kebudayaan untuk Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
7. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :
“Menjadi Pengelola Kepegawaian Yang Profesional dan Berbudaya”.

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis, melalui **Misi** Badan Kepegawaian Daerah DIY yaitu terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta,

Kepala

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

